PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

UNIT KERJA : **UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MAHMUL SIREGAR**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **819367**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 4.280.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 6.000 m2/50 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
4. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 3.600 m2 di KAB / KOTA LANGKAT, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
6. Tanah Seluas 750 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 322.000.000

1. MOBIL, HONDA HONDA BRIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOBIL, TOYOTA PAJERO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA — Rp. 32.000.000

D.	SURAT BERHARGA	Rp.	----
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.289.500.000
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	----
	Sub Total	Rp.	5.923.500.000
III.	HUTANG	Rp.	----
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.923.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.